

HEGEMONI ELIT NELAYAN PADA MASYARAKAT

(Studi tentang Penambangan Pasir Laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

Abdulloh Moh Rifqi

NIM: E74213124

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Abdulloh Moh Rifqi* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 24 Januari 2018

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a loop and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP.197202062007101003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Abdulloh Moh Rifqi* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 06 Februari 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Fuhid, M.Ag.

NIP.10021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Khoirul Yahya, M.Si.

NIP.197202062007101003

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si.

NIP.197711032009122002

Penguji I,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.

NIP.196909071994032001

Penguji II,

M. Anas Fakhruddin, M.Si.

NIP.198202102009011007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdulloh Moh Rifqi

NIM : E74213124

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Januari 2018



Abdulloh Moh Rifqi

E74213124



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdulloh Moh Rifqi
NIM : E74213124
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Filsafat Politik Islam
E-mail address : riefbrett313@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DOMINASI ELIT NELAYAN PADA MASYARAKAT

(Studi tentang Penambangan Pasir Laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2018

Penulis



(ABDULLOH MOH RIFQI)

ABSTRAK

Dominasi elit nelayan pada masyarakat dalam adanya kegiatan penambangan pasir laut di Desa Kramat sangatlah di khawatirkan bagi keberlangsung untuk memperoleh ikan di laut, elit nelayan yang bermodal kekuasaanya begitu mudah untuk mendapatkan konsensus dengan pemimpin sosial lainnya serta dengan modal kekuasaannya tersebut elit nelayan sewena-sewena dalam membuat keputusan dengan mengatasnamakan rakyat tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan terjadi bagi penerus di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah di antaranya: *pertama*, bagaimana elit nelayan melakukan dominasi pada masyarakat dalam proses penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ? *kedua* bagaimana problem dominasi elit nelayan pada masyarakat dalam proses penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ? Riset yang berbasis pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif.

Temuan penulis terkait elit nelayan melakukan dominasi pada masyarakat dalam penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yaitu menjadikan elit nelayan sebagai pemegang kuasa dalam bidang kelautan. Elit nelayan terlibat atau sengaja dilibatkan dalam segala penentuan yang terjadi di laut. Disini bentuk elit nelayan dalam mendominasi masyarakat melalui persetujuan dengan pemimpin kelompok masyarakat nelayan lainnya, dengan itu pemimpin yang sudah didominasi oleh sang hegemoni hanya mengarahkan pada kelompok yang dipimpinnya.

Sedangkan problem yang dialami oleh elit nelayan dalam melakukan dominasi pada masyarakat Desa Kramat yaitu mendapatkan perlawanan dari sebagian kelompok nelayan yang terkena dampak terlebih dahulu sebelum adanya sosialisasi dari elit nelayan yang melakukan dominasi. Perlawanan ini membuahkan hasil yaitu berhentinya kegiatan penambangan pasir laut di Desa Kramat serta mendapatkan ganti rugi sebesar enam ratus juta dari perusahaan yang melakukan eksploitasi.

Kata kunci : Dominasi, elit nelayan, penambangan pasir laut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hegemoni	26
1. Konsensus.....	29
2. Upaya Hegemoni Melalui Pabrik.....	32
a. Intelektual Tradisional	38
b. Intelektual Organik	39
B. Teori Elit	42

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kramat 50

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi, tembaga, perak, emas, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasi oleh negara. Hak menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk orang tertentu tetapi rakyat banyak.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup mewajibkan setiap kegiatan industri dan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan yang dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak mengenai lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengolahan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh

Banyaknya perusahaan yang melanggar aturan pemerintah tersebut, karna perusahaan memilih prosedur yang simple walaupun prosedur tersebut melanggar Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya perusahaan *java integrated industrial and port estate* (JIPE) yang mengeksploitasi penambangan pasir laut di daerah pesisir Desa Kramat, tanpa memperdulikan kebijakan pemerintah yang semestinya. Perusahaan swasta tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintahan Provinsi Jawa Timur menganggap reklamasi atau pengurukan laut untuk pembangunan JIPE di

² Ibid., 1.

Di dalam tulisan Ayatul Asmaul Husna mengatakan pasir yang bahannya berasal dari tanah yakni penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah.⁴ Apabila penggalian-penggaliannya ternyata menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainya maka penggalian tersebut harus segera dihentikan. Dalam penyedotan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan *java integrated industrial and port estate* (JIPE), dilihat oleh para nelayan diukur sampai kedalaman 5 meter dan lebar sampai 100 meter lebih sehingga dalam hal ini mengakibatkan air keruh dan ikan-ikan berpindah tempat sehingga banyak yang dirugikan dalam penyedotan tersebut.

⁴ Ayatul Asmaul Husna, "Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattallassang Kabutapen Takalar" (Skripsi Tidak Di Terbitkan, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), 27.

Gramsci menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa berhasil menyingkirkan kekuatan oposisi dan memenangkan persetujuan, baik secara aktif maupun pasif dari pada sekutunya. Menurut Gramsci, subjek dari tindakan politik tidak dapat di definisikan dengan kelas-kelas sosial pada saat mereka mencapai bentuk keinginan kolektif yang menciptakan ekspresi politik dari sistem hegemoni yang di kontruksi melalui ideologi.⁵

Pandangan Gramsci, dalam Nezar Patria dan Andi Arief bahwa hegemoni bekerja dengan dua tahap yaitu tahap dominasi dan tahap pengarahan atau kepemimpinan intelektual dan moral. Biasanya, tahap dominasi yang paling sering dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi kekuasaan seperti sekolah, universitas, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ideologi yang disusupkan lewat alat-alat tadi bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Gramsci memandang bahwa dominasi merupakan awal hegemoni. Jika sudah melalui tahapan dominasi ini, maka tahap berikutnya tinggal mengarahkan sebuah bentuk ketundukan kelas yang didominasi pada kelas yang

⁵ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni Dan Strategi Sosialis Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

Masyarakat dituntut untuk patuh pada kebijakan yang di buat para aktor elit politik. Menurut Pareto konsep elit ini semata-mata berfungsi untuk menekankan ketidak setaraan kualitas individu dalam setiap lingkup elit yang memerintah.⁷ Mosca menerangkan penguasaan minoritas terhadap mayoritas dengan fakta bahwa yang pertama adalah terorganisir. Penguasaan oleh suatu minoritas yang terorganisir untuk mematuhi suatu implus tunggal terhadap mayoritas yang tak terorganisir tidak terhindarkan. Kekuasaan minoritas tidak dapat di lawan oleh masing-masing individu dalam mayoritas, yang berdiri seorang diri di hadapan keseluruhan minoritas yang terorganisir. Pada saat yang sama, minoritas itu di organisir semata-mata demi alasan bahwa ia merupakan suatu minoritas dan juga dengan fakta bahwa minoritas itu biasanya terdiri dari individu-individu yang unggul. Para anggota minoritas yang berkuasa biasanya memiliki atribut yang nyata atau tampak, serta sangat dihargai dan berpengaruh dalam masyarakat di mana mereka hidup.⁸

⁶ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara Dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁸ Ibid., 4-5.

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Sumber daya alam seperti hutan, ikan dan pasir laut merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004), 24.

dampak terjadinya reklamasi di Kecamatan Manyar. Dalam permohonan itu, elit nelayan tersebut mengatasnamakan rakyat yang dipimpinnya tanpa ada sosialisasi ke kelompok masyarakat nelayan lainnya khususnya ketua nelayan Desa Kramat, sehingga terjadinya konsesus antara pihak elit nelayan dengan perusahaan. Oknum elit tersebut tidak merasionalisasi bagaimana pencemaran-pencemaran yang akan terjadi ketika pengurukan itu berjalan hingga pengurukan itu berakhir.

Pengurukan pasir laut di Desa Kramat diwarnai oleh kericuhan antara kelompok masyarakat nelayan hingga pemerintahan Desa Kramat. Karnanya dengan adanya pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh kapal pengeruk pasir yang mengabaikan permohonan pendalaman untuk alur nelayan dan permohonan tersebut diajukan oleh oknum elit nelayan tanpa dengan adanya sosialisasi kepada kelompok masyarakat nelayan lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya akomodasi yang menguntungkan sepihak atau sekelompoknya. Dalam hal ini tindakan kelompok nelayan yang menolak adanya penambangan pasir laut tersebut yaitu melaporkan kegiatan kepada polisi sektor, polisi resort, polisi perairan dan Badan Lingkungan Hidup. Karena terkait reklamasi untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Manyar itu telah memberikan dampak kepada pesisir laut Desa Kramat sehingga nelayan tidak bisa lagi mencari ikan serta alat tangkap ikan harus diperbesar, karena adanya kegiatan pengurukan tersebut membuat perairan laut Desa Kramat menjadi keruh atau kotor, alat tangkap lainnya seperti banjang di tabrak dan kapal tersebut menghalangi aktivitas nelayan untuk mencari ikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana elit nelayan melakukan dominasi pada masyarakat dalam proses penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana problem dominasi elit nelayan pada masyarakat dalam proses penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ?

Dengan adanya rumusan masalah yang sudah ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

2. Elit Nelayan

3. Penambangan Pasir laut

¹¹ <https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/pesona-puisi/teori-hegemoni/> (Minggu, 17 Desember 2017, 20:00)

Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian yang mempunyai kesimpulan berdasarkan objek yang diteliti. Di bawah ini penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- ¹² Ayatul Asmaul Husna,”*Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattalassang Kabutapen Takalar*” (Skripsi Tidak Di Terbitkan, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), 28.

[illegible]

¹⁴ Ayatul Asmaul Husna,”*Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattalassang Kabutapen Takalar*” (Skripsi Tidak di Terbitkan, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

mbangan pasir laut. Lebar karapas dan bobot tubu
nya penambangan pasir laut. Analisi regresi d
hubungan antara produksi pasir laut dengan p
nominasi dinilai dengan valuasi ekonomi melalui m
dus. Analisis regresi menunjukkan bahwa setiap k
kan menurunkan produksi rajungan. Terdapat pe
besar Rp. 10.046.625.000,- setiap tahun. Penamb
berdampak pada pola penangkapan nelayan rajun
Kecamatan Serang tidak membuat peraturan da
an pasir laut secara khusus yang didasarkan tentang
daan penelitian terdahulu dari paparan di atas b
ngan penelitian yang dilakukan penulis sehingga

mbangan pasir laut. Lebar karapas dan bobot tubu
nya penambangan pasir laut. Analisi regresi d
hubungan antara produksi pasir laut dengan p
nismi dinilai dengan valuasi ekonomi melalui m
dusen. Analisis regresi menunjukkan bahwa setiap k
kan menurunkan produksi rajungan. Terdapat pe
besar Rp. 10.046.625.000,- setiap tahun. Penamb
berdampak pada pola penangkapan nelayan rajun
upaten Serang tidak membuat peraturan da
an pasir laut secara khusus yang didasarkan tentang
daan penelitian terdahulu dari paparan di atas b
ngan penelitian yang dilakukan penulis sehingga

mbangan pasir laut. Lebar karapas dan bobot tubu
nya penambangan pasir laut. Analisi regresi d
hubungan antara produksi pasir laut dengan p
nismi dinilai dengan valuasi ekonomi melalui m
dusen. Analisis regresi menunjukkan bahwa setiap k
kan menurunkan produksi rajungan. Terdapat pe
besar Rp. 10.046.625.000,- setiap tahun. Penamb
berdampak pada pola penangkapan nelayan rajun
upaten Serang tidak membuat peraturan da
an pasir laut secara khusus yang didasarkan tentang
daan penelitian terdahulu dari paparan di atas b
ngan penelitian yang dilakukan penulis sehingga

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Dominasi Elit Nelayan Pada Masyarakat: Studi tentang Penambangan Pasir Laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara Bahasa kualitatif berarti meninjau berdasarkan mutu.¹⁶ Banister Et Al mendeskripsikan metode penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, bahwa inti dari penelitian kualitatif adalah sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.¹⁷

¹⁶ Bambang Murhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, 275.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 8.

2. Lokasi Penelitian

¹⁸ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 181.

Informan merupakan orang yang dapat memberikan data tentang keadaan atau hal-hal yang berkaitan tentang penelitian yang berlangsung. Peneliti dan informan memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

Pengambilan informan dilengkapi dengan rekomendasi informan yang telah dijadikan sebagai *key informan*, bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Berikut informan penelitian:

- a. Muhammad Khusnan sebagai kepala Dusun Ujungsawo serta Poskamwas yang menolak kegiatan penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Untuk memperoleh data yang jelas dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari informasi yang mengarah kepada penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus bisa berperan sebagai instrumen penelitian, di samping juga bantuan dari pihak yang benar-benar mengetahui tentang penambangan pasir laut yang terjadi di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Untuk itu, jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan atau sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁹ Data primer ini, diperoleh dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan yang disajikan melalui wawancara secara langsung. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball* yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh ke dua setelah data primer. Tidak menutup kemungkinan peneliti sulit atau tidak mendapatkan data dari sumber primer dikarenakan ada sesuatu hal yang sifatnya sangat pribadi. Oleh karena itu, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai sarana memperoleh data. Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pembandingan dari data primer yang telah diperoleh.²⁰Data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data atau dokumen yang ada kaitannya dalam penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), 129.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), 129.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitiannya adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Nasution mengamati bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang jauh dapat diobservasi dengan jelas. Sanafiah faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan atau tersamar dan observasi yang tak berstruktur.²¹

[illegible]

- Alur ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada dominasi yang dilakukan elit nelayan pada masyarakat terkait penambangan pasir laut.

- Mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami dan penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

- Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yakni yang berkaitan dengan dominasi yang dilakukan oleh elit nelayan terhadap masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif, menjaga keabsahan data yang diperoleh merupakan faktor utama. Maka dalam melakukan keabsahan data peneliti perlu memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti melakukan uji

[illegible]

a. Triangulasi.

Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teori, dan sumber data.²⁹ Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel.

1) Peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 264.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ketiga, berisi tentang setting penelitian yang membahas deskripsi umum lokasi penelitian.

Bab keempat, pada bab ini berisi penyajian dan analisis data serta memaparkan hasil penelitian.

Bab kelima, Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi.

KAJIAN TEORI

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut *eugemonia* sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang seajar. Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara. Kepustakaan Marxis menunjukkan, bahwa konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia yaitu Plekhanov.

¹ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara Dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Teori hegemoni dipergunakan untuk melihat bagaimana hegemoni dipraktekkan oleh siapa saja dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Bagi pemerintah daerah, hegemoni dipraktekkan dalam upaya merebut pengaruh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Gramsci membangun teorinya dengan menekankan ada penerimaan kelompok yang di dominasi terhadap kehadiran kelompok dominan yang berlangsung dalam suatu proses damai, tanpa adanya kekerasan.²

Kepemimpinan tersebut merupakan salah satu cara dari syarat-syarat utama untuk mencapai ke pucuk piramida dan memenangkan kekuasaan. Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan

² Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 103-105.

Pandangan Gramsci, dalam Nezar Patria dan Andi Arief bahwa hegemoni bekerja dengan dua tahap yaitu tahap dominasi dan tahap pengarahan atau kepemimpinan intelektual dan moral. Biasanya, tahap dominasi yang paling sering dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi kekuasaan seperti sekolah, universitas, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ideologi yang disusupkan lewat alat-alat tadi bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Gramsci memandang bahwa dominasi merupakan awal hegemoni. Jika sudah melalui tahapan dominasi ini, maka tahap berikutnya tinggal mengarahkan sebuah bentuk ketundukan kelas yang didominasi pada kelas yang mendominasi. Siapa yang mencoba melawan hegemoni dianggap orang yang tidak taat terhadap aturan, moral serta konsensus. Bahkan mungkin saja dianggap dari penyelewengan dan pembangkangan.⁴

³ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara Dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 117.

⁴ Ibid., 93.

⁴ Ibid., 93.

Terdapat dua interpretasi dalam memandang hegemoni, yang pertama melihat hegemoni sekedar sebagai kepemimpinan moral tanpa keikutsertaan praktek dominasi. Kedua, melihat hegemoni juga dapat berarti kepemimpinan moral dan dominasi sekaligus. Kedua interpretasi tersebut, akan terlihat tempatnya dalam eksplanasi lebih lanjut di dalam kita melihat hubungan antara negara dan hegemoni. Tetapi, sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu hubungan konsensus dan terbentuknya hegemoni dalam pabrik.

Konsensus yang menjadi salah satu kekuatan pemikiran sosio epistemologi, bermaksud menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan kebenaran. Sosio epistemologi bersifat kompleks dan dinamis. Konsensus justru hendak menawarkan sebuah pendekatan baru yaitu pendekatan komunikasi dan saling menyapa yang setara. Pendekatan tersebut menuntut adanya sikap kritis dan keterbukaan, serta kompetensi komunikatif pada subjek pengetahuan. Melalui bantuan teori ini, dapat dijelaskan bahwa tuntutan-tuntutan kebenaran selalu harus dicapai bukan lewat kekuasaan atau revolusi melainkan melalui konsensus rasional yang dicapai para subjek yang berkompeten.⁶

⁵ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara Dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁶ Aholiab Watloly, *Sosio-Epistimologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 103-104.

- ⁷ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), 124.

Ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent) dan hegemoni yang minimum.⁸

- 1) Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organisasi antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis.
- 2) Hegemoni yang merosot merupakan masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial

[illegible]

3) Hegemoni minimum merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas. Situasi seperti inilah yang terjadi di Italia dari periode unifikasi sampai pertengahan abad ini. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan negara baru yang di cita-citakan oleh kelompok hegemonis itu.

Gramsci menyimpulkan pandangan Taylor dalam tiga pandangan dasar, yaitu pembatasan pada tugas tertentu dalam proses produksi, sikap otomatisasi yang mekanis sebagai proses produksi dan proses penyusunan berbentuk insentif yang melunturkan semangat solidaritas kaum pekerja.

[illegible]

Asal usul praktis dari konsep hegemoni adalah gerakan dewan pabrik yang muncul di Turin selama meningkatkan gerakan revolusioner besar-besaran di Italia pada tahun 1919.¹⁰ Gramsci menyimpulkan bahwa, hegemoni secara dominan lahir dalam pabrik. Dengan adaptasi buruh pada kondisi-kondisi perusahaan, pemikirannya jauh dari usaha untuk mencapai kebebasan penuh. Dengan itu hegemoni lahir dari organ-organ masyarakat sipil.

⁹ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 128-129.

[illegible]

Strategi manajemen ini diterapkan juga di Italia. Akibatnya, sejak strategi Agnelli menaikkan produktivitas melalui pendalaman eksploitasi yang relatif dalam waktu kerja baru selama delapan jam per hari, kosongnya sebuah kontra strategi secara persis dalam hubungannya dengan kebijakan pengurangan skill sevara komprehensif, bermakna pada kekosongan suatu tingkat menengah antara perjuangan upah serikat buruh dan perebutan pabrik oleh dewan-dewan buruh.

¹¹ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), 132.

Struktur masyarakat sipil seperti universitas, sekolah, media massa, gereja, dan lain sebagainya. Menurut Gramsci struktur masyarakat tersebut mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi kesadaran massa, maka yang menguasai kelompok-kelompok tersebut akan dengan mudah merebut kekuasaan sosial dan politik. Sedangkan masyarakat politik sebaliknya, yakni aparatus yang memegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud seperti militer, polisi, peradilan dan birokrasi pemerintahan, serta dapat disimpulkan bahwa dalam memperoleh kekuasaan, suatu kelompok mendapatkan legitimasi oleh masyarakat, tidak hanya itu, selanjutnya kelompok yang berkuasa harus mampu mempengaruhi kelompok lain untuk menerima prinsip-prinsip, ide dan norma-norma yang diberikan,serta meyakinkan mereka bahwa hal ini prinsip, ide dan norma merupakan sebagai milik mereka juga.¹³

¹² Ibnu Mas'ud, *Wacana Lintas Pemikiran Interelasi Pemikiran Tokoh Dunia* (Yogyakarta: Media Kreativa, 2016), 144.

¹⁴ Roger Simon, *Gagasan Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 19-20.

¹⁶ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), 120-121

Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Gramsci mengatakan secara tak langsung konsensus sebagai komitmen aktif yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada *legitimate*. Konsensus secara historis lahir karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Sebuah konsensus yang diterima oleh kelas pekerja bagi Gramsci pada dasarnya bersifat pasif. Kemunculan konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka. Justru hal tersebut terjadi dikarenakan mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.¹⁸ Penggunaan kata hegemoni dalam pengertian Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain. Ada beberapa bagian dalam *Prison Notebooks* di mana Gramsci menggunakan hegemoni dalam pengertiannya yang umum yaitu penguasaan antar bangsa, antar kota dan desa.

Praktek hegemoni bukan tidak bisa dicegah. Secara teoretis, Gramsci memberi solusi untuk melawan hegemoni dengan hegemoni (*counter hegemony*)

¹⁸ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 126.

Kaum intelektual, memegang peranan penting di masyarakat. Bagi Gramsci, ada dua tipe intelektual yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Intelektual tradisional merupakan mereka yang menyandang tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu *given society*. Di mana intelektual ini terlihat independen, otonom, serta menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Jenis intelektual tradisional merupakan intelektual yang dapat dikategorikan sebagai intelektual otonom dan merdeka dari kelompok sosial dominan.

¹⁹ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 115-163.

Kelompok intelektual tradisional ini humanis mereka memisahkan intelegensi dari tatanan borjuis. Mereka hanya mengamati serta menjalani kehidupan masyarakat dari kejauhan juga seringkali bersifat konservatif serta anti terhadap perubahan. Menurut Gramsci tugas intelektual tradisional adalah segera memutuskan ketidak menentukan sikap dan bergabung bersama kelas-kelas yang revolusioner. Intelektual harus secara organis berhubungan dengan kelas buruh, menjadi bagian dari organisasi yang memang menyediakan kepemimpinan untuk kelas tertindas itu.

Merupakan intelektual yang berasal dari kelas tertentu bisa jadi berasal dari kelas borjuis dan memihak mereka, bisa juga berasal dari kelas buruh dan berpihak kepada perjuangan buruh itu.²¹ Mereka adalah intelektual dan organisator politik dan pada saat yang sama juga pemimpin perusahaan,

²¹ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 157.

Teori hegemoni Gramsci pada dasarnya merupakan kritik terselubung terhadap reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada penganut Marxisme maupun pemikiran non-Marxisme, yakni konsep yang mereduksi dan menganggap esensi terhadap suatu entiti tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, perselisihan tafsiran konsep seputar basik ekonomi dan superstruktur (ideologi, politik, pendidikan, budaya), di mana tafsiran ortodoks Marxisme percaya bahwa basic ekonomi menentukan superstruktur. Akibatnya sosialisme di

²⁵ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni Dan Strategi Sosialis Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

Elit merupakan mereka yang berada dalam puncak piramida itu, mereka yang punya pengaruh dan menentukan. Mereka bukan orang biasa, justru karena posisi dan pengaruhnya itu. Pareto telah menjelaskan definisi elit dengan amat jelas, bahwa setiap cabang kegiatan manusia, setiap individunya memiliki kapasitas yang berbeda-beda ia yang memiliki indeks tertinggi dalam cabang kegiatan masing-masing, maka itu lah elit. Jadi, setiap cabang kegiatan manusia terdapat para elitnya. Walaupun berbeda-beda cabang kegiatan, tapi hakikatnya seseorang elit adalah seseorang yang mampu berdiri di pucuk piramida cabang kegiatannya itu.²⁷ Gaetano Mosca mengungkapkan bahwa elit politik merupakan kelompok kecil dari warga negara yang berkuasa dalam sistem politik. Teori elit menjelaskan seputar kelompok penguasa dalam suatu sistem politik. Salah satu aspek yang dikaji dalam kehidupan bernegara adalah masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas masyarakat elit dan kelas masyarakat non elit atau masyarakat pada umumnya.²⁸

²⁶ Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri untuk Kader Inti Ideologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 437.

²⁸ Wahyu Wijiutomo, <https://sosialpolitikislam.wordpress.com/2015/04/02/elit-politik/> (Sabtu, 18 November 2017, 10:30)

bahasannya yang sebenarnya.²⁹ Elit terbagi menjadi dua kelas yaitu elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tak memerintah (*non- governing elite*) yang mencakup sisanya. Jadi kita memiliki dua lapisan dalam masyarakat yaitu lapisan yang rendah *non-elite*, yang disini pengaruh yang mungkin dimilikinya terhadap pemerintahan tidak menjadi perhatian kita dan kemudian lapisan yang tinggi, elite yang dibagi menjadi dua yaitu elit yang memerintah dan elit yang tak memerintah.

Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah merupakan hubungan kekuasaan, yang satu berkuasa atas yang lain. Kekuasaan itu yang pada hakikatnya berdasarkan kemampuan majikan untuk meniadakan kesempatan buruh untuk bekerja dan memperoleh nafkah dipakai untuk menindas keinginan kaum buruh untuk menguasai pekerjaan mereka sendiri untuk tidak dihisap, agar kaum buruh bekerja seluruhnya demi mereka. Karena itu, kelas atas secara hakiki merupakan kelas penindas. Pekerjaan upahan merupakan pekerjaan di mana seorang menjual tenaga kerjanya demi memperoleh upah yang disebut pekerjaan kaum tertindas harapan dan hak mereka dirampas.³⁰

Teori elit diarahkan untuk menentang gagasan sosialisme marxis tentang kelas penguasa yang kekuatan politiknya didasarkan atas kepemilikan alat-alat produksi, dan yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu

²⁹ T.B. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), 2.

³⁰ Franz Magnis-Suseno. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta:Gramedia Pustaka utama,1999), 114.

menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Konsep elite politik di sajikan oleh Mosca dan Pareto sebagai istilah kunci dalam suatu ilmu politik baru.

Pareto dalam tulisan awalnya dalam karyanya *Cours d'economie politique* dia telah menawarkan gagasan kurva normal distribusi kekayaan dalam suatu masyarakat. Dalam *Les systemes socialistes* dia meneruskan argumennya, pertama, bahwa bila individu-individu disusun menurut kriteria yang lain, misalnya tingkat kecerdasan, kemampuan matematis, bakat musik, karakter moral dan sebagainya, mungkin akan menghasilkan kurva distribusi yang serupa dengan kurva distribusi kekayaan dan kedua, bahwa bila individu-individu disusun menurut tingkat kekuasaan atau pengaruh sosial dan politik mereka, akan ditemukan dalam sebagian besar masyarakat bahwa individu-individu yang sama menempati tempat yang sama dalam hirarki ini seperti halnya dalam hirarki kekayaan tersebut. Yang disebut kelas atas biasanya juga merupakan yang terkaya. Kelas-kelas ini mewakili suatu elit dan suatu aristokrasi.

Eksistensi para elit itu ditentukan, antara lain oleh sejauh mana mereka mampu mempertahankan posisi dan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah. Peran positif elit di rekam oleh Bottomore merujuk pada antara lain Clive Bell dalam bukunya *Civilization*. Suatu masyarakat yang beradap, catat Bell, ditandai oleh kenalaran serta nilai-nilai dan bahwa kualitas ini hanya dapat dihasilkan, ditanamkan serta di pelihara oleh suatu elit.

Studi tentang elit senantiasa terkait dengan konsep kepentingan. Kajian-kajian tentang dinamika elit politik, pastilah merupakan kajian-kajian tentang

Dalam semua masyarakat dari masyarakat yang paling terkebelakang dan yang hampir tidak pernah menikmati fajar peradaban, hingga ke masyarakat yang paling kuat dan maju muncul dua kelas manusia yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas *pertama*, yang jumlahnya selalu lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh kekuasaan. *Kedua*, kelas yang jumlahnya lebih banyak, diperintah dan di kendalikan oleh yang pertama dengan cara yang pada masa sekarang ini kurang lebih berstatus legal, diktatorial dan kejam.³¹

³¹ T.B. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), 2-3.

Golongan elit memiliki konsensus mengenai nilai-nilai dasar suatu sistem dan berusaha memelihara dan mempertahankan sistem itu. Selain itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh elit politik bukanlah cerminan aspirasi rakyat khalayak dan bukanlah hasil tuntutan yang diajukan khalayak, melainkan lebih merupakan cerminan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kelompok elit itu sendiri.³²

³² Alfath Didi Mabrur, “*Kekuasaan Elit*; Robert Michael, Gaetano Mosca dan C. Wright Mills”, (Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

Elit politik terdiri dari para pemegang kekuasaan suatu lembaga politik. Para pemegang kekuasaan mencakup kepemimpinan dan formasi sosial yang biasanya merupakan asal usul para pemimpin, dan kepadanya diberikan pertanggungjawaban selama suatu jangka waktu tertentu. Pada kenyataannya, istilah elit sekarang ini secara umum digunakan untuk kelompok-kelompok fungsional, terutama okupasional yang memiliki status tinggi demi alasan apa pun dalam suatu masyarakat.

Hal yang terpenting adalah bagaimana setiap aktor politik memiliki keyakinan moral dan etika dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik itu, sehingga cara dan tujuan bermuara pada titik moralitas dan kemaslahatan rakyat.

³⁴ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elit* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Menurut Karl Marx elit politik terdapat tiga macam, di mana elit dapat berubah dengan melalui revolusi yaitu *pertama*, metode posisi bahwasanya metode posisi merupakan mereka elit politik yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis merupakan membuat keputusan serta kebijakan dan di nyatakan atas nama negara. *Kedua*, metode reputasi merupakan elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. *Ketiga*, metode pengaruh yaitu elit politik yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Elit ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh atau mampu mempengaruhi dalam lapisan masyarakat dapat di kategorikan sebagai elit politik.³⁶

³⁶ M. Syafi'ie, digilib.uinsby.ac.id (Sabtu, 2 Desember 2017, 09:00)

SETTING PENELITIAN

1. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Kramat merupakan desa pesisir dengan luas 314 hektar yang terbagi menjadi empat dusun, antara lain Dusun Kramat, Dusun Ujungsawo, Dusun Watugajah dan Dusun Karangliman.

Tabel 3.1

Sebelah Utara	Desa Tajungwidoro
Sebelah Timur	laut jawa atau selat Madura
Sebelah Selatan	Kecamatan Manyar
Sebelah Barat	Desa Watuagung

Sumber data : Pemerintahan Desa Kramat

Kondisi geografis yang diapit antara laut jawa dan ribuan hektar tambak dengan udara angin yang menyejukan untuk bersantai. Di sebelah selatan Desa Kramat ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan mangrove yang berfungsi sebagai rumah bagi para bibit ikan untuk tumbuh serta mengurangi adanya dampak banjir.

Secara umum Desa Kramat dikenal masyarakat eksternal sebagai Desa Mengare. Padahal Desa Mengare merupakan nama sebuah pulau yang terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Watuagung, Desa Tajungwidoro dan Desa Kramat. Seringkali oleh penduduk sekitar mereka menyebutnya sebagai pulau seribu tambak, karena keberadaannya memang dikelilingi oleh ribuan hektar tambak yang terbentang luas di sepanjang menuju Desa Kramat tersebut.

Selain itu Desa Kramat terkenal hasil ikan bandeng terenak dan terbesar di se Kabupaten Gresik. Seringkali desa ini memenangkan perlombaan di mana dengan kategori juara lomba bandeng terbesar dan terenak di kawasan Kabupaten Gresik. Lokasinya terbilang masih cukup asri membuat tiap

pengunjung yang datang merasa betah dan nyaman untuk berlama-lama menikmati keindahan alam yang tersuguhkan ini.

Jarak menuju dari jalan raya ke Desa Kramat yaitu dengan sepanjang sembilan kilometer. Namun kondisi infrastruktur jalan menuju desa tersebut belum bisa dikaitkan baik melihat jalan yang sudah di paving, tapi masih banyak jalan yang berlubang atau paving yang pecah dan juga jalan bergelombang disebabkan lokasi berdekatan dengan area tambak yang membuat kondisi tanahnya bergerak.

2. Kondisi Demografis Desa Kramat

Kondisi demografis merupakan data yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk yang berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan.

a. Aspek Kependudukan

Tabel 3.2

Jumlah penduduk Desa Kramat

Laki-Laki		Perempuan	
1.414		1.366	
Umur			
0-17	18-55	> 56	
858	1.624	298	
Jumlah Kepala Keluarga			
778			

Sumber data : Pemerintahan Desa Kramat

Berdasarkan data inventaris desa, total jumlah penduduk yang ada di Desa Kramat adalah 2.780 jiwa dengan perincian jumlah penduduk.

b. Aspek Perekonomian

Tanpa terkecuali, pada aspek ini didasarkan pada pola kebiasaan masyarakat dalam menjalankan rutinitas dalam hal kebudayaan. Namun demikian, ada juga aturan atau norma-norma yang berfungsi mengatur seluruh perilaku seseorang di dalam masyarakat, di mana hal itu sangat dipatuhi oleh penduduk Desa Kramat. Aturan tersebut berupa aturan-aturan tak tertulis, yang sudah ada pada sejak dulu dan secara turun menurun dipatuhi oleh masyarakat Desa Kramat.

Masyarakat Desa Kramat mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan yang berbeda dengan yang lain seperti tradisi, antara lain:

- 1) Tradisi pemilihan kepala desa. Warga Desa Kramat mempercayai bahwa akan ada petunjuk pemenang sebelum pesta demokrasi itu dimulai. Petunjuk tersebut muncul pada sebelum pencoblosan yaitu sekitar pada jam satu pagi. Petunjuk tersebut dinamai pulung, yang berbentuk seperti bola api.
- 2) Tradisi Agustusan. Acara peringatan kemerdekaan ini yang dirangkai dalam acara perlombaan maupun karnaval, yang memiliki tujuan untuk mengenang fase penjajahan.
- 3) Acara khitan, yang memakai hiburan keliling kampung dengan naik kuda. Kuda tersebut di haruskan atau diwajibkan menyembah batu yang berbentuk gajah dengan dibantu pawang kuda tersebut. Batu tersebut bertempat di Dusun Watugajah. Bila kuda tersebut tak menyembah batu itu, maka setelah keliling kampung, hewan tersebut akan meninggal, dan kejadian ini selalu terjadi bila ada hal seperti itu.

- 4) Tradisi menentukan hari pernikahan. Hari baik dalam menentukan hari pernikahan yaitu dengan menghitung weton atau hari lahir sesuai penanggalan jawa, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bertujuan untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kelancaran dalam setiap penggolakan di dalam keluarga tersebut.
- 5) Tradisi nikahan, acara nikahan ini bila sama-sama asli warga Mengare, acara pernikahan sama pada umumnya. Tetapi bila ada pengantin laki-laki yang bukan berasal dari Desa Mengare, maka setelah resepsi akan diadakan keliling/toaf 7 kali di bangsal. Bangsal ini bertempat di Dusun Kramat. Apabila pengantin laki-laki tersebut tidak melakukan, maka yang terjadi di dalam keluarga tersebut tidak akan tentram.
- 6) Tradisi setelah hari raya Idul Fitri. Tradisi yang satu ini bila sudah lewat seminggu dari hari raya idul fitri, maka yang dilakukan warga Desa Kramat mengadakan tumpengan pagi hari yang bertempat di musholla atau masjid wilayah masing-masing. Setelah tumpengan selesai, mayoritas khususnya anak muda pergi ke madura sambil manaiki perahu untuk mendatangi *lampo*. *Lampo* ini berbentuk seperti monas peninggalan masa penjajahan Belanda.
- 7) Tradisi slametan, sering di adakan oleh warga Desa Kramat seperti ibu yang melahirkan, malam jumat, transportasi baru, khatam Al-Qur'an, khitan, tunangan atau kawinan, bayi yang sudah bisa bicara atau bisa berjalan, dan banyak lagi acara slametan yang belum bisa disebutkan penulis di sini. Dalam tradisi sedekah laut atau slametan yang bertempat

8) Tradisi kirim doa selama tujuh hari. Memperingati anggota keluarga yang meninggal serta warga tersebut melakukan tradisi doa tujuh harian, empat puluh harian, seratus harian, dan seribu harian.

Perairan laut Indonesia merupakan perairan laut tropis yang kaya akan sumber daya hidup dan non hidup. Salah satu sumber daya kelautan non hidup adalah pasir laut yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologisnya sebagai substrak bagi organisme benthik, terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Fungsi ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah untuk diambil secara komersial atau sebagai bahan baku untuk reklamasi pantai. Pasir laut dapat dieksploitasikan dengan menambanginya, menggunakan kapal keruk yang dilengkapi dengan pompa menyedot pasir karena dilengkapi dengan alat penyedot pasir. Eksploitasi ini menyebabkan dampak negatif bagi ekosistem. Di mana salah

Perairan laut Indonesia merupakan perairan laut tropis yang kaya akan sumber daya hidup dan non hidup. Salah satu sumber daya kelautan non hidup adalah pasir laut yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologisnya sebagai substrak bagi organisme benthik, terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Fungsi ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah untuk diambil mineralnya atau sebagai bahan baku untuk reklamasi pantai. Pasir laut dapat dieksploitasikan dengan menambanginya, menggunakan kapal keruk yang sekaligus menyedot pasir karena dilengkapi dengan alat penyedot pasir. Eksploitasi ini menyebabkan dampak negatif bagi ekosistem. Di mana salah

Perairan laut Indonesia merupakan perairan laut tropis yang kaya akan sumber daya hidup dan non hidup. Salah satu sumber daya kelautan non hidup adalah pasir laut yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologisnya sebagai substrak bagi organisme benthik, terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Fungsi ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah untuk diambil mineralnya atau sebagai bahan baku untuk reklamasi pantai. Pasir laut dapat dieksploitasikan dengan menambanginya, menggunakan kapal keruk yang sekaligus menyedot pasir karena dilengkapi dengan alat penyedot pasir. Eksploitasi ini menyebabkan dampak negatif bagi ekosistem. Di mana salah

² Ayatul Asmaul Husna, "Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattallassang Kabutapen Takalar" (Skripsi Tidak Di Terbitkan, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), 28.

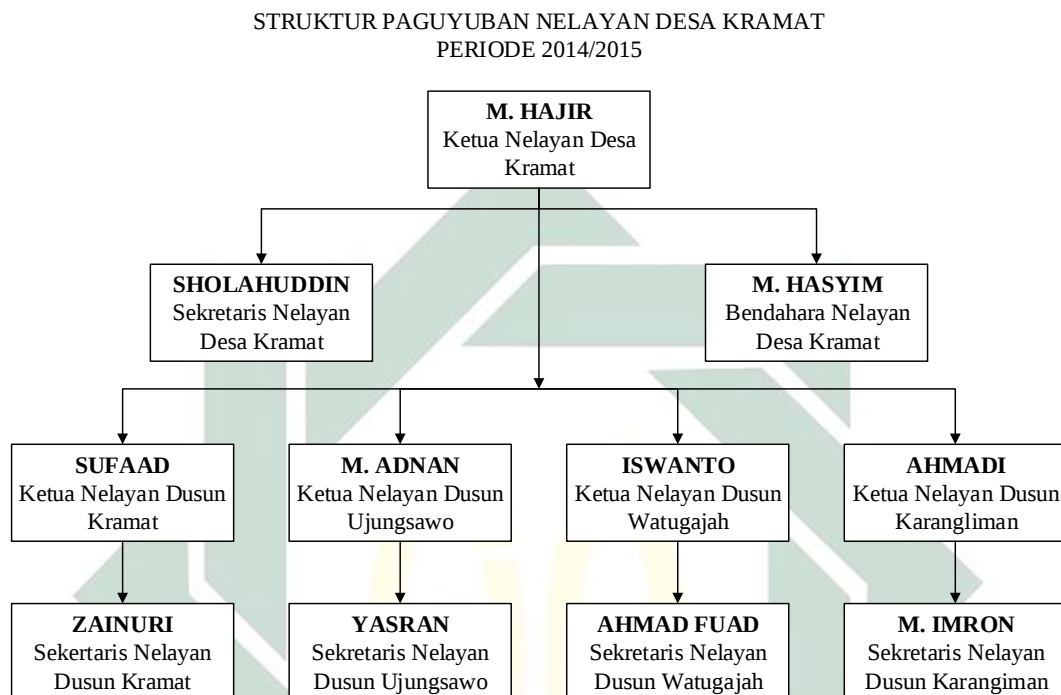
Tempat pengerukan tersebut merupakan tempat di mana nelayan untuk menangkap ikan. Ketika tempat mata pencariannya diusik oleh pihak luar, masyarakat geram adanya penambangan pasir tersebut. Hingga mengakibatkan konflik antara nelayan serta konflik nelayan dengan perusahaan yang mengeruk pasir laut. Karnanya pihak perusahaan mengeruk karna sudah dapat persetujuan dari kepala desa yang dibantu oleh Sufaad yang menduduki jabatan di paguyuban nelayan sebagai ketua nelayan Dusun Kramat. Hal ini senadah dengan teori hegemoni yang di cetuskan oleh Gramsci bahwa hubungan dominasi bukan dengan kekuasaan melainkan dengan pemimpin, karena hegemoni merupakan organisasi konsensus. Ketua nelayan Dusun Kramat mengajukan permohonan pengurukan alur nelayan kepada perusahaan karna dampak terjadinya reklamasi di Kecamatan Manyar. Permohonan elit nelayan tersebut mengatasnamakan rakyat

yang dipimpinnya tanpa ada sosialisasi ke kelompok masyarakat nelayan lainnya khususnya ketua nelayan Desa Kramat, sehingga terjadinya konsesus antara pihak elit nelayan dengan perusahaan. Oknum elit tersebut tidak merasionalisasi bagaimana pencemaran-pencemaran yang akan terjadi ketika pengurukan itu berjalan hingga pengurukan itu berakhir.

Pengurukan pasir laut di Desa Kramat diwarnai oleh kericuhan antara kelompok masyarakat nelayan hingga pemerintahan Desa Kramat. Karnanya dengan adanya pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh kapal pengeruk pasir yang mengabaikan permohonan pendalaman untuk alur nelayan, yang diajukan oleh oknum elit nelayan tanpa di sosialisasikan kepada kelompok masyarakat nelayan lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya akomodasi yang menguntungkan sepihak atau sekelompoknya. Dalam hal ini tindakan kelompok nelayan yang menolak adanya penambangan pasir laut tersebut yaitu melaporkan kegiatan kepada polisi sektor, polisi restor, polisi perairan dan Badan Lingkungan Hidup. Karna terkait reklamasi untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Manyar itu telah memberikan dampak kepada pesisir laut Desa Kramat sehingga nelayan tidak bisa lagi mencari ikan serta alat tangkap ikan harus di perbesar, mengapa demikian, adanya kegiatan pengurukan tersebut membuat perairan laut Desa Kramat menjadi keruh atau kotor, alat tangkap lainnya seperti banjang di tabrak dan kapal tersebut menghalangi aktivitas nelayan untuk mencari ikan.

Gambar 3.5

Struktur paguyuban nelayan Desa Kramat



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Elit Nelayan Melakukan Dominasi pada Masyarakat.

Elit nelayan dalam konteks ini adalah orang yang menduduki kekuasaan serta mengatur dan bertanggung jawab untuk menjadikan kelompok nelayan yang lebih sejahtera. Eksistensi elit itu ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu mempertahankan posisi dan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah. Melalui posisi tersebut elit nelayan mampu mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat nelayan. Dengan potensi itu, tidak jarang sosok elit nelayan terlibat atau sengaja dilibatkan dalam percaturan politik hingga penentuan kebijakan, terutama di bidang kelautan pada masing-masing daerahnya.

Sumber daya alam seperti ikan dan pasir laut merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu, permasalahan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menguntungkan serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sumber daya alam satu-satunya adalah laut serta masyarakat tersebut yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan dan penghasil

Setidaknya menurut penulis setelah melakukan pengelompokan data dari hasil wawancara terkait elit nelayan pada masyarakat tentang penambangan pasir laut serta melihat kenyataan yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik saat ini, bahwasannya terjadi dominasi yang dilakukan ketua elit nelayan Dusun Kramat agar mendapatkan konsensus dan partisipasi dari masyarakat yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan menjadi norma yang disepakati bersama. Elit nelayan dalam melakukan dominasi pada masyarakat yang terjadi di Desa Kramat sebagai berikut.

³ B.T. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), 5

⁴ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁵ T.B. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), 2.

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 60.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 60.

“..Hasil musyawarah itu bahwa nelayan Dusun Kramat sepakat mengajukan permohonan untuk mengeruk jalur alur nelayan agar nelayan Dusun Kramat bisa kembali berkerja..”⁹

Dangkalnya area pesisir yang semakin membesar, elit nelayan menemukan solusi dari hasil musyawarah terkait keresahan tersebut, dengan mengajukan permohonan pengurukan di Dusun Kramat kepada perusahaan Bina Mitra Indosejahtera dengan tujuan agar memudahkan para nelayan pulang pergi menjadi pendangkalan. Permohonan pengurukan yang diajukan

⁹ Sufaad, *Wawancara*, Gresik, 13 Agustus 2017.

Proses pengurukan kurang lebih sudah berjalan dalam kurun waktu lima bulanan yang dilakukan oleh perusahaan Bina Mitra Indosejahtera, serta hal tersebut mendapatkan respon negatif dari nelayan Dusun Ujungawo. Sebagaimana yang dipaparkan di bawah ini.

Narasumber selaku kelompok masyarakat pengawas (Poskamwas) atau orang yang di tokohkan di Dusun Ujungsawo menindak lanjuti permasalahan yang dialami warganya terkait pengurukan pasir laut yang merusak sumber daya alam dan menghambat perolehan hasil dari penangkapan ikan di laut. Dari hasil pertemuan antara Khusnan dengan oknum yang bekerja di perusahaan yang bertempat di kapal. Dari pertemuan itu narasumber hanya menghasilkan informasi terkait adanya pengurukan di pesisir laut Desa Kramat. Sebagaimana yang hasil wawancara.

¹⁰ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

¹⁰ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

¹¹ Muhammad Khusnan, *Wawancara*, Gresik, 29 Juni 2017.

“..Lah kok pengurukan itu berjalan 5 bulan kalah gak salah, dari pihak nelayan Ujungsawo merasa keberatan adanya penambangan pasir itu. Terjadi rame-rame, seluruh nelayan Desa Kramat kumpul dan membahas pengerukan itu..”¹⁵

“..Ketika Sufaad sudah mendengar ada kecurigaan terkait pengurukan itu, Sufaad itu membuat surat permohonan yang ke dua yang ditanda tangani oleh ketua nelayan Dusun Watugajah dan Karangliman..”¹⁶

“.. ya namanya orang desa, disurat permohonannya itu loh gak dijelaskan panjang dan dalamnya berapa meter yang harus dikeruk. Sebenarnya ya ngomong-ngomong dulu sama orang yang lebih mengerti terkait hal seperti permohonan itu, namanya orang desa yang penting tujuannya tercapai, macak luguh-luguh kelar..”¹⁷

¹⁵ Sufaad, *Wawancara*, Gresik 13 Agustus 2017.

¹⁶ Muhammad Hajir, *Wawancara*, Gresik, 23 Desember 2017.

¹⁷ Muhammad Taufiq, *Wawancara*, Gresik, 9 Desember 2017.

¹⁸ Sufaad, *Wawancara*, Gresik, 13 Agustus 2017.

Selain itu, ketua nelayan Dusun Kramat juga terus bergerak untuk lebih menyakinkan para pemimpin kelompok nelayan lainnya dengan tujuan agar lebih mendapat dukungan dan simpati. Hal itu dilakukan dengan cara menjalin komunikasi secara intens dan pendekatan persuasif agar lebih mendapatkan massa yang lebih banyak serta menyatuhkan pemikiran-pemikiran dengan apa yang dikehendaknya. Dengan demikian elit nelayan lebih mudah untuk mengendalikan dan mengarahkan para pemimpin kelompok nelayan lainnya. Ide yang disusupkan oleh sang dominasi kepada pemimpin kelompok nelayan lainnya, sebagaimana dari hasil wawancara.

Dalam wawancara dengan ketua nelayan Dusun Kramat ini menunjukkan bahwa dominasi terus dilakukan agar tujuan dari kepentingan mereka sendiri menjadi kehendak kolektif masyarakat nelayan Desa Kramat. Hal ini sebagaimana teori yang di ungkapkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe bahwa

²⁰ Sufaad, *Wawancara*, Gresik, 13 Agustus 2017.

Menurut Antonio Gramsci suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional.²² Ketua nelayan Dusun Kramat melakukan serta menanamkan pola pikir yang bersifat kebudayaan, budaya pedesaan, khususnya Desa Kramat memanglah begitu kental dan tanggap bila kelompok masyarakat lainnya terkena musibah. Dalam hal ini ketua nelayan Dusun Kramat menyusupkan ideologi dengan realita yang ada serta menjadikan permasalahan kolektif. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ketua nelayan dusun Watugajah.

²¹ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni Dan Strategi Sosialisme Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

²² Roger Simon, *Gagasan Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 87.

²² Roger Simon, *Gagasan Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 87.

dangkal sampai tidak bisa dilewati oleh perahu, bila air pasang nelayan Dusun Kramat bisa. Biasanya air pasang kan hanya ada pada jam-jam pagi, siang itu air sudah surut. Sesudah ada musyawarah itu Sufaad ke rumah, dia memohon, ya saya kasihan lah, agar benar mau bersatu agar nelayan Kramat bisa bekerja lagi.”²³

Penanaman ideologi yang bersifat permasalahan seluruh masyarakat nelayan Desa Kramat ini juga dilakukan ketua nelayan dusun kramat pada ketua nelayan Dusun Karangliman. Sebagaimana hasil dari wawancara.

“Awalnya itu kan ada reklamasi di pelabuhan manyar yang mengakibatkan dangkalnya alur nelayan Dusun Kramat, ya namanya orang sama-sama nelayan mengerti ketika ada warga dari desa kita sendiri terjadi kevakuman bekerja. Saya tidak kerja satu hari saja, sudah bingung uang apa yang mau dibuat ngopi, beli rokok. Dari keresahan Dusun Kramat itu lah, saya dan warga sini membantu agar nelayan dusun kramat bisa kembali bekerja lagi. Caranya perairan laut yang dangkal itu dikeruk, dipindah ke daratan. Dari Desa Kramat loh siapa yang punya alat pengeurkan pasir itu, akhirnya jalan satu-satunya dengan biaya gratis mengajukan permohonan kepada perusahaan yang mengeruk itu.”²⁴

Penulis dapat menyimpulkan bahwa cara kerja ketua nelayan Dusun Kramat untuk penguasaan masyarakat dominan dengan melakukan penguasaan kepada pemimpin kelompok sosial lainnya menggunakan penanaman ideologi serta ketua nelayan Dusun Kramat merekayasa kesadaran kepada pemimpin kelompok sosial dengan realita yang ada sehingga tanpa disadari mereka rela dan mendukung kekuasaan kelompok atau kelas dominan.

Konteks ini senadah dengan teori yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang

²³ Iswanto, *Wawancara*, Gresik 24 Desember 2017.

²⁴ Ahmadi, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2017.

Dominasi yang dilakukan elit nelayan Dusun Kramat dilakukan dengan persuasif, bukan melalui kekerasan atau paksaan. Elit nelayan memanfaatkan elemen-elemen nelayan yang sudah terbentuk dan telah menerima cara pandang elit nelayan untuk berusaha menguasai rakyat dengan cara menguasai pola pikirnya. Selain itu, elit nelayan Dusun Kramat berusaha untuk mempengaruhi kelompok nelayan yang tidak sepemikiran. Diantaranya adalah dengan memberikan sejumlah penawaran atau loby politik. Seperti hasil wawancara di bawah ini.

²⁶ Toto Suharto, Kesadaran Yang Bertentangan Sebagai Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pendidikan: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam Di Masa Orde Baru, *Jurnal Analisis*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2012, 454.

Dari paparan di atas merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh elit nelayan Dusun Kramat untuk mempengaruhi pola pikir sehingga tujuan dari kegiatan pengurukan tersebut berjalan dengan semestinya tanpa adanya perlawanan. Finansial merupakan alat yang begitu mudah untuk merubah pola pikir dan mengarahkan seseorang. Sehingga hal ini begitu sensitif dikalangan pedesaan khususnya di Desa Kramat. Strategi finansial tersebut merupakan bentuk yang memungkinkan pihak dominasi untuk merencanakan serta mewujudkan pertumbuhan yang terus menerus demi tercapainya ke stabilitasan. Ruang ekonomi memang menjadi segi fundamental dari masalah ini, namun hal itu mendapatkan penolakan dari ketua nelayan Dusun Ujungsawo, dikarenakan kerugian yang dialami oleh masyarakat nelayan Ujungsawo terlalu besar serta ketua nelayan tersebut lebih mementikan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya dari pada kesejahteraan dirinya sendiri yang harus mengorbankan masyarakat yang dipimpinnya.

²⁷ Muhammad Adnan, *Wawancara*, Gresik , 23 Desember 2017.

[illegible]

seperti kerabat atau seorang yang ditokohkan dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini, elit nelayan Dusun Kramat yang bekerjasama dengan perusahaan Bina Mitra Indosejahtera bersedia mengabulkan permintaan pekerjaan yang pernah diajukan oleh kelompok masyarakat pengawas dan masyarakat Desa Kramat kepada perusahaan Bina Mitra Indosejahtera, masyarakat mengajukan permintaan antara lain.

“..waktu saya ke BMIS, pertama permintaan dari saya untuk meperkerjakan orang-orang diutamakan kepada nelayan Desa Kramat. Kedua, minta penjagaan ya karna adanya penyedotan mengganggu aktivitas nelaya dan yang ketiga, minta kompensasi..”²⁹

Narasumber tersebut merupakan seorang yang mempunyai karismatik pada masyarakatnya, seorang yang menjadi panutan bila terjadi permasalahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dominasi terhadap elit nelayan Dusun Ujungsawo terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan Bina Mitra Indosejahtera untuk mendominasi kaum pemberontak, berhasil ketika permintaanya terkabul. Permohonan tersebut seperti membuka lapangan kerja serta mengurai pengangguran masyarakat dan meminta kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo. Hal ini senadah dengan teori Gramsci bahwa hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.³⁰

²⁹ Muhammad Khusnan, *Wawancara*, 29 Juni 2017.

³⁰ Roger Simon, *Gagasan Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 19.

“..Waktu itu hanya diberi pekerjaan pemasangan gedek untuk penahan tanah, sebenarnya tembok penahan tanah itu terbuat dari batu bata tetapi menggunakan gedek dari bahan kayu, jadi gedek berbahan kayu tersebut di namakan gedek penahan tanah, tetapi masyarakat dikasih pekerjaan tersebut para masyarakat nelayan tidak mau menerima karna permintaan yang lainnya belom di kabulkan oleh perusahaan Bina Mitra Indosejahtera..”³¹

“..Akhirnya kita di kasih pekerjaan kayak pembuatan perahu bambu, tanggul dan tabing itu setiap dusun di kasih uang duapuluh juta..”³²

³¹ Muhammad Khusnan, *Wawancara*, Gresik 29 Juni 2017.

[illegible]

Horton dan Hunt mengutarakan, bahwa pemimpin mengacu pada suatu kemampuan untuk mengendalikan kegiatan orang lain, meskipun di luar kemampuan itu. Pendapat ini juga menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau masyarakat untuk dapat mengontrol aktifitas orang yang dikuasai. Dengan cara mengeluarkan ide-ide yang membuat orang yang dikuasai tersebut sulit untuk menolak. Ide-ide yang dicetuskan orang berkuasa tersebut adalah potensi dia di dalam memegang kekuasaan. Sehingga, orang yang dikuasai itu tunduk dan menuruti apapun kemauan orang yang berkuasa, meskipun diluar kemampuan dia.³⁷

Ketua nelayan Dusun Watugajah mensosialisaikan adanya pengurukan pasir laut di pesisir desa Kramat yang merupakan kegiatan tersebut karna adanya permohonan dari Sufaad, agar masyarakat nelayan Dusun Kramat bisa kembali bekerja seperti biasanya. Serta ketua nelayan Dusun Watugajah bersatu dengan

³⁸ Iswanto, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2017.

“Setelah Faad mengajukan permohonan itu, saya kumpulkan warga khususnya nelayan sini, bila siapa yang ingin kerja di perusahaan langsung mengajukan ke Faad sana. Itu kan termasuk mengurangi anak muda yang pengangguran disini, agar keseharinya tidak minumm saja. Serta kita rek juga mendapatkan santunan perbulannya 5 juta. Tapi masalahnya Dusun Ujungsawo, bila dusun sana juga setuju kita enak, santunan itu bertambah menjadi 10 juta perbulan serta pembagian santunan ini rata tidak termasuk nelayan saja. Dan warga mensetujuinya tanpa mengajukan pertanyaan pada saya”³⁹

Dari paparan narasumber ini bahwa terjadinya sosialisasi terkait pertaan dalam mendukung masyarakat nelayan dusun Kramat terkait adanya pasir di pesisir laut Desa Kramat yang dilakukan oleh Bina Mitra. Serta pemimpin ini menginformasikan kepada masyarakat nelayan pimpinya bahwa masyarakat Desa Kramat mendapatkan kompensasi

Sang dominasi yang merupakan ketua nelayan Dusun Kramat, berdiskusi pada pemimpin kelompok masyarakat nelayan agar tidak ikut serta dalam penolakan kegiatan pengurukan pasir yang dilakukan oleh pemerintah.

³⁹ Ahmadi, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2017.

“..Kalo pribadi ya tidak mendapat apa-apa, Cuma menghasilkan bagi seluruh masyarakat nelayan sini (Dusun Watugajah), karna permasalahan nelayan ini pertahun pasti ada, seperti daratan yang jebol karna ombak kapal, alat tangkap ikan ditabrak kapal, dari permasalahan itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan Dusun Kramat saat itu, dan bila kita mengajukan permohonan bantuan pada perusahaan Bina Mitra Indosejahtera insyallah dikasih. Lihat waktu dusun kramat mengadakan orkes dangdut, dananya itu kan dari perusahaan Bina Mitra Indosejahtera..”⁴²

⁴² Iswanto, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2017.

juga dikatakan oleh ketua nelayan Dusun Karangliman. Sebagaimana dari hasil wawancara.

“..Kalo pribadi ya tidak mendapat apa-apa, Cuma menghasilkan bagi seluruh masyarakat nelayan sini, karna masalah nelayan ini perthaan pasti ada, seperti darta yang jebol, perahu ditabrak kapal, dari permasalahan itu kita mengajukan proposal pada perusahaan BMIS insyallah dikasih. Lihat waktu dusun kramat mengadakan orkes dangdut, dananya itu kan dari perusahaan BMIS..”⁴³

Menurut dari dua narasumber yang sudah dipaparkan diatas itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa cara yang dilakukan oleh ketua nelayan Dusun Kramat tersebut merupakan strategi untuk memperkuat serta mempersatukan ideologi dan tujuan awal yang sudah disepakati, agar kelas yang terbentuk tidak terjadi perpecahan dan krisisnnya dominasi. Strategi yang ditawarkan antara lain, memudahkan pencairan bantuan bila nelayan terkena musibah, kompensasi lima juta hingga sepuluh juta perbulan disetiap satu dusun dan lapangan pekerjaan yang memadai. Sebagaimana dalam teori hegemoni bahwa, dalam proses komunikasi lobiing ini dapat dilihat secara jelas ketika hegemoni dari kekuatan pihak yang memerintah sedang terancam dan mengalami perpecahan.

B. Problem Dominasi Elit Nelayan pada Masyarakat.

Problem dalam konteks ini merupakan permasalahan yang dijumpai pada dominasi elit nelayan pada masyarakat dalam kegiatan penambangan pasir laut di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Problem disini juga menjelaskan terkait adanya penolakan dari kelompok masyarakat nelayan lainnya

⁴³ Ahmadi, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2017.

Pro-kontra mengiringi elit nelayan dalam mendominasi masyarakat khususnya pada nelayan. Pada dasarnya elit nelayan merupakan seorang yang mempunyai karismatik dan menjadi panutan oleh masyarakat nelayan dalam organisasi, biasanya elit ini merupakan kelompok minoritas dalam lapisan masyarakat. Sejak dulu masyarakat Desa Kramat mengandalkan penghasilan dari hasil menangkap ikan di laut, yang merupakan sebagai keberlangsungan hidup. Bahkan menurut Masyuri Imron, bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budaya.⁴⁴

⁴⁴ Masyuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5 No. 1, 2003, 63.

“..Ibaratkan gini, got dikeruk pasti menimbulkan bau yang tak enak pada sekitar, air menjadi kotor tetapi lama-lama kan enak aliran air itu menjadi lancar, gak gampang sumbat. Yang namanya orang sini tau sendiri lah, ada apa-apa sedikit dikira dapat uang, ada permainan, ya begitulah..”⁴⁵

Melihat pernyataan ketua nelayan Dusun Kramat selaku aktor dominasi yaitu adanya kegagalan dalam mendominasi pada masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo, dikarenakan banyaknya dampak yang dialami oleh masyarakat nelayan dusun ujungsawo. Masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo menilai bahwa terjadinya kegiatan pengurukan pasir karena adanya kontrak politik yang hanya menguntungkan sepihak.

Kegiatan pengurukan di pesisir laut Desa Kramat hanya bermodal konsensus dengan masyarakat nelayan yang dipimpinnya saja serta tanpa sepengetahuan kelompok masyarakat nelayan dusun lainnya khususnya ketua nelayan Desa Kramat. Dalam kegiatan pengurukan itu ketua nelayan Desa Kramat tidak mengetahui proses pra pengurukan pasir laut di Desa Kramat. Sebagaimana hasil wawancara.

“..Saya awalnya tidak diberi tahu terkait adanya pengerukan di Desa Kramat, setelah pengurukan berjalan dan ada rame-rame, itu saya di beri tahu, menurut saya ya sudah terlambat, memberitahu ketika pengurukan sudah berjalan..”⁴⁶

Ketua nelayan Desa Kramat berpendapat bahwa adanya pengurukan pasir yang disebabkan permohonan pengurukan oleh ketua nelayan Dusun Kramat itu, tanpa sepengetahuan ketua nelayan desa serta musyawarah dengan masyarakat nelayan se Desa Kramat. Pengurukan berjalan lima bulan, timbulnya kecurigaan oleh kelompok masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo dalam kegiatan

⁴⁵ Sufaad, *Wawancara*, Gresik, 13 Agustus 2017.

⁴⁶ Muhammad Hajir, *Wawancara*, Gresik 23 Desember 2017.

Persoalan mengemuka ketika ketua nelayan yang merupakan pemimpin dalam paguyuban masyarakat nelayan dalam wilayah Dusun Kramat melakukan akomodasi dalam kepentingan individu maupun kelompok tanpa sepengetahuan atau meminta izin pada pemimpin kelompok masyarakat nelayan lainnya. Disinilah sebagian masyarakat menilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap peran sosial yang selama ini dijalankan di asosiasi masyarakat nelayan, karena hal tersebut dianggap sebagai akomodasi sepihak. Apalagi elit nelayan tersebut telah melakukan hegemoni atau dominasi pada pemimpin kelompok nelayan lainnya untuk menghancurkan sekutu yang mencoba melawan ideologinya.

Menurut Antonio Gramsci bahwa hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara

“..waktu itu saya bilang ke pak Rudi kaloh keadaan di desa sini terjadi rame-rame karna adanya pengurukan pasir itu. Pak Rudi bilang itu urusan perusahaan, kan ya dari pihak kita sudah mendapatkan perizinan dari kepala desa..”⁴⁸

Menurut Antonio Gramsci, seperti yang telah dijelaskan di kerangka teori bahwa hegemoni merupakan sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya berisi sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan yang mencontohkan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna

⁴⁸ Sufaad, *Wawancara*, Gresik, 13 Agustus 2017

Terjadi penolakan kegiatan penambangan pasir laut oleh masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo yang di eksploitasi oleh perusahaan Bina Mitra Indosejahtera dengan menggunakan konsensus masyarakat Desa Kramat, tepatnya pada pemimpin kelompok nelayan tersebut. Permasalahan ini karena waktu sosialisasi di Kecamatan Bungah, perusahaan tidak mengambil pasir di kawasan Desa Kramat melainkan dialokasikan di Kecamatan Panceng serta laut Madura. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pokmaswas.

Sebelum kegiatan pengurukan pasir laut di Desa Kramat, terdapat sosialisasi dengan masyarakat sekitar, tepatnya dengan masyarakat Desa Kramat yang pastinya terkena dampak adanya reklamasi di Kecamatan Manyar tersebut. Sosialisasi yang bertempat di Kecamatan Bungah itu untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bungah khususnya masyarakat Desa Kramat bahwa dalam sosialisasi tersebut memberitahu adanya pembangunan pelabuhan dengan memperluas daratan atau disebut reklamasi. Pengambilan pasir

⁵⁰ Muhammad Khusnan, *Wawancara*, Gresik, 29 Juni 2017.

Pada situsasi seperti ini masyarakat Desa Kramat menjadi bertanya-tanya dengan adanya sosialisasi di Kecamatan Bungah pada waktu sebelum pengurukan. Kegiatan pengurukan pasir laut tersebut merupakan terhambatnya aktivitas nelayan untuk mencari ikan, karena kapal-kapal pengurukan itu menghadang jalur perahu untuk bernelayan. Sebab dari kegiatan pengurukan itu merupakan sebuah ancaman perekonomian masyarakat Desa Kramat yang menurun. Seperti hasil wawancara.

Penyatuan persepsi dengan seluruh masyarakat oleh ketua nelayan Desa Kramat terkait pengurukan pasir laut yang telah merugikan masyarakat nelayan, salah satunya yaitu terjadinya penabrakan alat perangkap ikan (banjang) dan air laut menjadi keruh sehingga membuat ikan pindah tempat dari sebelumnya. Masyarakat Dusun Ujungsawo merupakan dusun yang menolak adanya kegiatan pengurukan pasir laut. Pada hal ini lah masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo akan melaporkan kegiatan ini kepada pihak yang berwajib. Musyawarah yang diadakan masyarakat Dusun Ujungsawo, di hadiri oleh seluruh masyarakat

[illegible]

“Akhirnya dari situ kita adakan musyawarah dan besoknya demo ke pelabuhan Kecamatan Manyar ke tempat perusahaan, yang menghasilkan bahwa dari nelayan Ujungsawo akan membawa urusan ini ke hukum. Akhirnya perusahaan itu dilaporkan ke polisi restor, polisi sektor, polisi perairan, Badan Lingkungan Hidup”⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Hajir, *Wawancara*, Gresik, 23 Desember 2017.

“..Sempat saya juga ya mau dilaporkan sama orang Ujungsawo itu terkait hal ini. Akhirnya dari pihak perusahaan menindak cepat dengan memberikan kompensasi ke Desa Kramat. Kompensasi itu juga tidak membuat suasana damai, malah ingin minta kompensasi yang besar..”⁵⁵

⁵⁵ Sufaad, *Wawancara*, Gresik, 13 Agustus 2017.

⁵⁶http://www.surabayapagi.com/read/129970/2015/09/19/JIPE_Bermodal_Ijin_Bupati_Gresik.html. (Kamis, 7 September 2017, 11:55)

Dirasa terus dirugikan dengan adanya pengurukan pasir yang dilakukan oleh perusahaan Bina Mitra Indosejahtera terus menerus, maka masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo merencanakan akan mengadakan demo lagi yang lebih besar dengan mengarahkan ratusan perahu. Selain itu juga, mengajak masyarakat nelayan Dusun Watugajah dan masyarakat nelayan Dusun Karangliman dengan menyatukan satu suara. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat nelayan Dusun Watugajah dan Karangliman tersebut, dikarenakan memilih zona aman. Berikut ini dari hasil wawancara.

Dengan demikian, masyarakat nelayan Desa Kramat menyimpulkan akan akan demo lagi pada tanggal 14 November 2015. Namun hal itu, dicegah polisi restor Gresik dan diputuskan untuk mengantinya dengan mediasi. Restor mejanjikan bahwasannya mediasi akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 akan tetapi terjadi kemunduran hingga tanggal 28 November 2015. Tindakan penolakan demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat

[illegible]

Masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo terus menunggu janji adanya mediasi yang telah disepakati sebelumnya. Ternyata hal itu hanya dijadikan alat untuk menenangkan gejolak masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo pada waktu itu. Seperti hasil wawancara.

polisi restor berujung sia-sia tanpa adanya tindak lanjut dari polisi restor yang akan mengadakan mediasi masyarakat nelayan Desa Kramat dengan perusahaan. Penungguan kelompok masyarakat nelayan berujung tidak mendapatkan hasil yang semestinya diharapkan oleh masyarakat nelayan. Dalam hal ini masyarakat nelayan bertekad untuk melaporkan kegiatan pengurukan ini kepada polisi perairan, polisi resor dan Badan Lingkungan Hidup. Dengan berjalannya waktu menunggu hasil laporan, pihak kelompok nelayan yang tidak setuju dengan adanya kegiatan pengurukan pasir laut diundang oleh perusahaan untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam pertemuan tersebut yang bertempat di kapal pengurukan pasir laut bahwa

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

“Ya udah nggak, desa sini sudah dicoret kok. Pihak perusahaan waktu nelayan Dusun Ujungsawo melakukan demo, melaporkan kesini situ, pihak perusahaan sudah merasa capek karna dikejar-kejar terus. Dari pada gini terus pihak perusahaan memberi kompensasi 600 juta itu tadi.”⁶⁰

Aksi masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo memang ditakutkan oleh penguasa dan aktor hegemoni sehingga pengurukan tersebut berjalan kurang lancar selama enam bulan. Kemungkinan bila tidak ada kelompok masyarakat yang

[illegible]

Hasil wawancara oleh ketua nelayan Dusun Kramat:

Hasil wawancara oleh ketua nelayan Desa Kramat:

Hasil wawancara oleh kepala desa.

Adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo menyebabkan pengurusan tidak dapat dilanjutkan sampai pada ujung Desa Kramat. Elit nelayan berguman jika tidak adanya penolakan dari masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo, masyarakat Desa Kramat akan mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di perusahaan. Serta gaji dari perusahaan yang di dapatkan terus menerus oleh masyarakat Desa Kramat sampai pengurusan itu selesai. Dalam tindakan ini yang

⁶³ Muhammad Taufiq, *Wawancara*, Gresik, 9 Desember 2017.

PENUTUP

Sebagai bahan akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal yang menjadi temuan-temuan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian di mana elit nelayan Dusun Kramat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di kelompok/dusunnya dalam persoalan kegiatan penambangan pasir laut di Desa Kramat. Melalui posisi kekuasaan tersebut, elit nelayan Dusun Kramat mampu mendominasi serta mempengaruhi kelompok masyarakat nelayan lainnya dan dalam hegemoni tersebut, elit nelayan Dusun Kramat memperoleh problem dalam mendominasi kelompok masyarakat nelayan terkait adanya kegiatan penambangan pasir laut di Desa Kramat.

- 100

dampak yang terjadi akibat penambangan pasir laut, seperti perangkap ikan yang ditabrak, air keruh, dan lain-lain. Warga Dusun Ujungsawo geram adanya penambangan pasir tersebut yang merugikan pendapatan dari hasil nelayan. Dampak tersebut seperti air keruh, tempat pencairan dihalangi oleh kapal yang mengeruk pasir laut dan alat tangkap yang harus diganti lebih besar. Dari keresahan masyarakat itu lah masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo menyampaikan aspirasi kepada perusahaan dan mengajak seluruh nelayan Desa Kramat untuk demo dan meminta ganti rugi ke tempat penambangan pasir tersebut. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Dusun Ujungsawo untuk membuat masyarakat kembali sejahtera serta bisa beraktivitas seperti sebelumnya, dalam hal ini masyarakat melaporkan kasus tersebut kepada polisi sektor, polisi restor, polisi perairan dan Badan Lingkungan Hidup dengan tujuan agar pengurukan yang ada di pesisir Kramat terhentikan.

Penyelesaian dari masalah yang diteliti oleh penulis adalah terjadinya servasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup ke lokasi pengurukan pasir laut tersebut serta dari pihak Badan Lingkungan Hidup memberhentikan kegiatan pengurukan itu serta perusahaan terkena sanksi yang berupa ganti rugi 600 juta kepada masyarakat nelayan Desa Kramat. Ketika kompensasi tersebut turun sudah

yang melakukan kegiatan penambangan pasir laut, sehingga seharusnya ada kebijakan lebih responsif yang lebih memihak kepada masyarakat setempat, mengingat kegiatan pencaharian utama masyarakat Desa Kramat adalah mencari ikan di laut. Pada pemegang kekuasaan baik itu ketua nelayan dan kepala desa yang sudah dipercayai oleh masyarakat untuk menjalankan amanah dan memajukan organisasi yang dipimpinnya agar menjadi organisasi yang unggul dan berkompeten, serta pemimpin harus lebih transparansi dalam melakukan pekerjaannya.

yang melakuk

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Eriyanto. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- John W. Creswell. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. *Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri untuk Kader Inti Ideologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. *Hegemoni Dan Strategi Sosialis Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Lexy. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta;Gramedia Pustaka utama, 1999.
- Mas'ud, Ibnu. *Wacana Lintas Pemikiran Interelasi Pemikiran Tokoh Dunia* Yogyakarta: Media Kreativa, 2016.
- Murhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, 2006.
- Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Wijakangka, Agga Ramses. Analisis Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Pabrik Karya Putu Wijaya, *Jurnal Artikulasi*, Vol.5 No.1 Februari 2008.

Wijakangka, Agga Ramses. Analisis Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Pabrik Karya Putu Wijaya, *Jurnal Artikulasi*, Vol.5 No.1 Februari 2008.

http://www.surabayapagi.com/read/129970/2015/09/19/JIPE_Bermodal_Ijin_Bupati_Gresik.html. (Kamis, 7 September 2017).

M. Syafi'ie, digilib.uinsby.ac.id (Sabtu, 2 Desember 2017)

Wijiutomo, Wahyu. <https://sosialpolitikislam.wordpress.com/2015/04/02/elit-politik/> “Elit Politik”. (Sabtu, 18 November 2017).

Muhammad Khusnan, Wawancara, Gresik, 29 Juni 2017.

Muhammad Taufiq, *Wawancara*, Gresik, 9 Desember 2017.

Muhammad Hajir, Wawancara, 23 Desember 2017.

Muhammad Adnan, *Wawancara*, Gresik , 23 Desember 2017.

Iswanto, *Wawancara*, Gresik 24 Desember 2017.

Ahmadi, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2017.